



Peran Ma'had Al-Zaytun dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Perspektif Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dan *Fiqh Siyasa*

Iwan¹, Abdur Rahim², Siti Ngainnur Rohmah³

^{1,2,3}Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia

E-mail: iwancemen1749@gmail.com, rahim@iai-alzaytun.ac.id, siti.ngainnur@iai-alzaytun.ac.id

Article Info	Abstract
Article History Received: 2024-07-22 Revised: 2024-08-19 Published: 2024-09-01	The purpose of this study is to determine the role of Ma'had Al-Zaytun in realizing the World Maritime Axis in the perspective of Presidential Regulation Number 34 of 2022 and <i>Fiqh Siyasa</i> . This research method uses a legal research approach that is carried out normatively juridical. The data sources used are primary data sources, namely Presidential Regulation Number 34 of 2022, <i>Fiqh Siyasa</i> books and secondary data sources, namely, books, journals, documents, laws and regulations, and so on. The results showed that the role of Ma'had Al-Zaytun in realizing the world maritime axis based on Presidential Regulation Number 34 of 2022 is to actively integrate the maritime curriculum, develop student skills in maritime technology, and collaborate with the government for the implementation of sustainable programs in the maritime sector. The role of Ma'had Al-Zaytun in realizing the world maritime axis based on <i>Fiqh Siyasa</i> is in accordance with <i>Fiqh Siyasa</i> related to <i>Hifz Nafs and Hifz Maal</i> . Ma'had Al-Zaytun has an important role in realizing the world maritime axis in accordance with the <i>Fiqh Siyasa</i> perspective in the classification of <i>Hifz Maal</i> (protection of property) and <i>Hifz Nafs</i> (protection of the soul). Ma'had Al-Zaytun, as an Islamic educational institution, plays a role in producing a generation that is not only superior in maritime science and technology, but also has an awareness of the importance of maintaining and preserving marine wealth as a mandate from Allah.
Keywords: <i>Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>World Maritime Axis;</i> <i>Fiqh Siyasa.</i>	

Artikel Info	Abstrak
Sejarah Artikel Diterima: 2024-07-22 Direvisi: 2024-08-19 Dipublikasi: 2024-09-01	Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peran Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan poros maritim dunia perspektif Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dan <i>Fiqh Siyasa</i> . Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022, buku <i>Fiqh Siyasa</i> dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peran Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan poros maritim dunia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 yaitu secara aktif mengintegrasikan kurikulum maritim, mengembangkan keterampilan siswa dalam teknologi maritim, serta berkolaborasi dengan pemerintah untuk implementasi program-program yang berkelanjutan dalam sektor maritim. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan poros maritim dunia berdasarkan <i>Fiqh Siyasa</i> adalah sesuai dengan <i>Fiqh Siyasa</i> terkait <i>Hifz Nafs</i> dan <i>Hifz Maal</i> . Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam mewujudkan poros maritim dunia sesuai dengan perspektif <i>Fiqh Siyasa</i> dalam klasifikasi <i>Hifz Maal</i> (perlindungan harta) dan <i>Hifz Nafs</i> (perlindungan jiwa). Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam, berperan dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan laut sebagai amanah dari Allah.
Kata kunci: <i>Peran Ma'had Al-Zaytun;</i> <i>Poros Maritim Dunia;</i> <i>Peraturan Presiden;</i> <i>Fiqh Siyasa.</i>	

I. PENDAHULUAN

Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang menyatakan bertumpah darah satu, yaitu tanah air Indonesia menunjukkan bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang sadar akan jati dirinya sebagai bangsa yang memiliki daratan dan lautan, bangsa petani dan pelaut, serta bangsa penakluk gunung dan samudera. Bangsa Indonesia secara efektif menyatakan bahwa laut, selat, dan perairan di antara pulau-pulau di

nusantara merupakan satu kesatuan yang utuh. Pulau-pulau di Indonesia, dari Pulau Rondo hingga Merauke, Pulau Miangas hingga Pulau Deli, Pulau Sekatung hingga Pulau Ndana, perairan, selat, dan samudera merupakan pemersatu dan bukan pemisah puluhan ribu pulau di Indonesia. Sekitar 70% wilayah Indonesia ditutupi oleh lautan. Laut Indonesia, yang dicirikan oleh geometri garis pantai, topografi, dan lorong-lorong yang rumit,

merupakan satu-satunya penghubung langsung antara Pasifik tropis dan Samudra Hindia, yang dikenal sebagai Arus Lintas Indonesia (*Indonesian Throughflow/ITF*). Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memainkan peran penting dalam kenaikan permukaan air laut global dan mitigasi perubahan iklim (Susanto, 2018). Dengan garis pantai yang jauh lebih besar daripada laut dan pulau-pulau yang terletak di lokasi strategis, jelaslah bahwa Indonesia memiliki kebutuhan mendasar untuk melindungi dan memanfaatkan lautnya, mempertahankan identitas dan budaya nasional yang kuat, serta memanfaatkan pulau-pulau yang terletak di lokasi strategis untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan menciptakan pembangunan berkelanjutan di masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip dalam Konstitusi (Edrian, 2017).

Kekuatan Sriwijaya yang mampu menguasai Selat Malaka dan menjalin hubungan sejajar dengan Chola Nalanda dari India dan Dinasti Tang dari Tiongkok, serta kemenangan Sultan Fatahilah dalam mengusir Portugis di Teluk Sunda Kelapa, menunjukkan bahwa bangsa Indonesia juga memiliki budaya strategi maritim yang kuat. Pasca Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, persatuan dan kesatuan tanah air Indonesia semakin erat setelah Indonesia dengan diplomasi yang piawai dan tanpa menembakkan satu peluru pun berhasil mengubah laut lepas yang memisahkan pulau-pulau menjadi perairan yang berada di dalam kedaulatan Indonesia yang pelaksanaan hak dan kewajibannya dijamin oleh hukum internasional, yaitu Konvensi Hukum Laut 1982 (*United Nations Convention on the Law of the Sea 1982*). Konvensi tersebut telah diratifikasi dalam hukum nasional melalui Undang-Undang No. 17 Tahun 1985 tentang Pengesahan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Kedaulatan atas perairan nusantara diperoleh setelah melalui proses penolakan oleh beberapa negara terhadap Deklarasi Djuanda pada 13 Desember 1957 dan perundingan multilateral yang alot selama lebih dari satu dasawarsa, dunia internasional akhirnya mengakui keinginan kuat Indonesia untuk mewujudkan kesatuan tanah air dengan melakukan inovasi hukum yang dilakukan melalui proklamasi sepihak tentang negara kepulauan menjadi suatu asas hukum internasional (Nasheed & Kamal, 2023). Peran laut bagi Indonesia dapat dikategorikan menjadi dua bagian: fungsi vital, yang berdampak pada

eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan fungsi non vital (Pudjiastuti et al., 2021).

Posisi strategis Indonesia tidak hanya terbatas pada lokasinya yang berada di antara dua benua, Asia dan Australia, atau di antara dua samudera, Samudera Pasifik dan Samudera Hindia, tetapi juga di antara Laut Cina Timur dan Laut Cina Selatan. Selain faktor geografis dan kondisi sosial ekonomi, posisi strategis Indonesia menempatkan Indonesia pada posisi krusial dalam lingkungan global, yaitu dalam mempengaruhi stabilitas politik dan ekonomi serta keamanan lingkungan regional dan internasional. Beberapa kekuatan besar dunia semakin memusatkan perhatian mereka pada kawasan Indo-Pasifik. Konsep Jepang tentang Pertemuan Dua Laut, yang dipresentasikan kepada India, seiring dengan meningkatnya penggunaan istilah Indo-Pasifik, menekankan pentingnya rute transportasi terbuka untuk orang, barang, modal, dan pengetahuan antara Jepang dan India. Konsep ini juga bertujuan untuk meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara (Fathiraini et al., 2020).

Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam, memiliki potensi untuk mendukung implementasi kebijakan Poros Maritim Dunia melalui program "Samudra Biru," Ma'had Al-Zaytun bertujuan untuk mengembangkan potensi ekonomi di sektor kelautan dan perikanan dengan mengenang kembali tradisi pembuatan kapal kayu tradisional. Dengan rencana untuk memperluas kapasitas pembuatan kapal, Ma'had Al-Zaytun berkomitmen untuk mendukung nelayan Indonesia dan menjaga kedaulatan maritim. Namun demikian, dalam konteks evaluasi kebijakan dan Peran Ma'had Al-Zaytun terkait poros maritim, perlu dipertimbangkan juga aspek-aspek *Fiqh Siyarah*. *Fiqh Siyarah* menekankan pentingnya kemaslahatan umum (maslahah), keadilan, kesetaraan, kerjasama, dan pendidikan dalam setiap kebijakan. Ma'had Al-Zaytun dapat memainkan Peran penting dalam mendukung pembangunan maritim yang bermanfaat bagi masyarakat luas, melalui pendidikan, penelitian, kerjasama dengan pemerintah dan industri, pemberdayaan masyarakat pesisir, dan advokasi kebijakan maritim di tingkat nasional dan internasional.

Dengan mempertimbangkan semua aspek ini, latar belakang masalah ini menjadi landasan yang kokoh untuk penelitian lebih lanjut tentang Peran Ma'had Al-Zaytun dalam implementasi kebijakan poros maritim Dunia dari perspektif

Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dan *Fiqh Siyasah*.

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif. Sumber data yang digunakan adalah Sumber data primer yaitu Peraturan Presiden Nomor 34 tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2022-2025, buku *Fiqh Siyasah* karya Prof. Dr. H.A. Djazuli dan buku *Maqashid Syari'ah* karya Dr. Busyro, M.Ag. dan sumber data sekunder yaitu, buku, jurnal, dokumen, peraturan perundangan, dan sebagainya.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan poros maritim Dunia perspektif Peraturan Presiden No 34 Tahun 2022

Ma'had Al-Zaytun, sebagai institusi pendidikan yang berkomitmen terhadap pengembangan karakter dan pengetahuan siswa, turut serta dalam implementasi kebijakan Poros Maritim Dunia. Kebijakan ini, yang bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia, memiliki dampak luas dalam berbagai sektor, termasuk pendidikan. Di Ma'had Al-Zaytun, penerapan kebijakan ini terlihat dari berbagai program dan juga kegiatan yang mengedepankan pengetahuan maritim serta kesadaran lingkungan (Qurianto, 2023).

Sinergi antara Ma'had Al-Zaytun dan pemerintah Indonesia merupakan elemen kunci dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Kerjasama ini mencakup berbagai aspek, mulai dari pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, hingga implementasi program-program maritim yang berkelanjutan. Ma'had Al-Zaytun, dengan basis pendidikan dan nilai-nilai *Fiqh Siyasah* yang kuat, berperan sebagai mitra strategis bagi pemerintah dalam mengembangkan sektor maritim yang inklusif dan berdaya saing global (Meliala, 2023). Kolaborasi antara Ma'had Al-Zaytun dan pemerintah terlihat nyata dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diarahkan untuk masyarakat pesisir. Pemerintah memberikan dukungan melalui penyediaan dana, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung program-program tersebut. Di sisi lain, Ma'had Al-Zaytun menyediakan tenaga

pengajar, modul pelatihan, dan fasilitas pendidikan yang berkualitas. Sinergi ini telah berhasil menciptakan program-program yang memberdayakan nelayan dan masyarakat pesisir dengan keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka (Siswoputro, 2023).

Selain itu, dalam konteks kolaborasi ini, Ma'had Al-Zaytun, dengan basis pendidikan dan nilai-nilai *Fiqh Siyasah* yang kuat, memainkan peran penting sebagai mitra strategis pemerintah. Sinergi ini juga tercermin dalam berbagai program pelatihan dan pengembangan kapasitas yang diarahkan untuk masyarakat pesisir, yang didukung oleh pemerintah melalui penyediaan dana, fasilitas, dan kebijakan yang mendukung. Menurut pendapat saya sebagai penulis, meskipun tantangan dalam kolaborasi antara Ma'had Al-Zaytun dan pemerintah Indonesia cukup signifikan, upaya untuk mengatasinya terus dilakukan dengan gigih. Komunikasi yang lebih intensif dan transparan antara kedua belah pihak sangat penting untuk memastikan bahwa setiap hambatan dapat diidentifikasi dan diatasi dengan cepat. Dengan meningkatkan komunikasi, Ma'had Al-Zaytun dan pemerintah dapat lebih mudah menyelaraskan visi dan strategi mereka, sehingga kerjasama dapat berjalan lebih efisien dan efektif. Selain itu, peningkatan kapasitas kelembagaan juga menjadi kunci dalam memperkuat sinergi antara Ma'had Al-Zaytun dan pemerintah. Dengan memperkuat kelembagaan, baik dari segi sumber daya manusia maupun infrastruktur, kedua pihak dapat lebih siap menghadapi berbagai tantangan yang muncul. Peningkatan kapasitas ini juga mencakup pelatihan dan pengembangan keterampilan bagi staf dan pengelola program, sehingga mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka dengan lebih baik. Peningkatan kapasitas kelembagaan ini pada akhirnya akan meningkatkan kualitas dan dampak dari program-program yang dijalankan (Prawoto & Anisa, 2023).

Menurut pendapat saya sebagai penulis, Ma'had Al-Zaytun telah menunjukkan komitmen yang sangat kuat dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia. Institusi ini tidak hanya mengintegrasikan kurikulum maritim ke dalam program pendidikannya, tetapi juga mengadakan berbagai kegiatan praktis yang membekali

siswa dengan pengetahuan dan keterampilan yang relevan. Misalnya, siswa diajarkan tentang teknologi maritim, navigasi, dan budidaya ikan, yang semuanya sangat penting dalam konteks pengembangan sektor maritim. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun secara aktif mempersiapkan generasi muda untuk berkontribusi dalam visi Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain pendidikan formal, Ma'had Al-Zaytun juga berperan dalam berbagai proyek penelitian dan inovasi yang bertujuan untuk mengatasi tantangan-tantangan di sektor maritim. Misalnya, pengembangan alat penangkap ikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan merupakan salah satu inovasi yang telah membantu nelayan lokal meningkatkan hasil tangkapan mereka tanpa merusak ekosistem laut. Selain itu, program konservasi lingkungan pesisir seperti penanaman mangrove dan pelestarian terumbu karang menunjukkan komitmen Ma'had Al-Zaytun terhadap keberlanjutan sumber daya laut. Upaya-upaya ini tidak hanya berdampak positif bagi lingkungan, tetapi juga memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat kegiatan maritim global. Namun, perlu diakui bahwa implementasi kebijakan maritim di Ma'had Al-Zaytun tidak lepas dari berbagai tantangan. Keterbatasan sumber daya, baik dalam hal dana maupun infrastruktur, sering kali menjadi hambatan dalam mengembangkan fasilitas pendidikan dan penelitian yang memadai. Selain itu, perubahan mindset masyarakat dan siswa untuk lebih peduli terhadap isu-isu maritim memerlukan waktu dan upaya yang konsisten (Suryawan et al., 2021).

Meski demikian, upaya yang dilakukan oleh Ma'had Al-Zaytun merupakan bagian penting dari kontribusi institusi ini dalam mendukung visi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Dengan terus beradaptasi dan mengembangkan program-program yang relevan, saya percaya Ma'had Al-Zaytun dapat terus memberikan kontribusi yang signifikan dalam mewujudkan visi tersebut. Program "Samudra Biru" yang diinisiasi oleh Ma'had Al-Zaytun merupakan langkah strategis dalam mendukung pengembangan ekonomi sektor kelautan dan perikanan Indonesia. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan keterampilan siswa dalam bidang maritim serta mempromosikan praktik berkelanjutan di sektor kelautan. Melalui pendidikan dan

pelatihan yang komprehensif, Ma'had Al-Zaytun berusaha membekali siswa dengan pengetahuan dan kemampuan yang dapat diterapkan langsung di industri kelautan dan perikanan.

Salah satu dampak positif dari program "Samudra Biru" adalah peningkatan keterampilan praktis siswa dalam bidang kelautan. Melalui berbagai kegiatan pelatihan, seperti budidaya ikan, teknik penangkapan ikan yang ramah lingkungan, dan pengelolaan sumber daya laut, siswa Ma'had Al-Zaytun mampu mengaplikasikan pengetahuan mereka secara langsung di lapangan. Hal ini tidak hanya meningkatkan potensi siswa untuk berkontribusi dalam ekonomi kelautan, tetapi juga menciptakan peluang kerja bagi mereka di sektor perikanan dan industri terkait (Puspitawati, 2021).

B. Peran Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan poros maritim Dunia perspektif Fiqh Siyasah

Menurut Imam Syatibi Allah menurunkan *syariat* (aturan hukum) tiada lain untuk menjaga tujuan-tujuannya dalam kehidupan manusia, yakni kemaslahatan dunia dan akhirat. Singkatnya, diturunkannya syari'at itu hanyalah untuk mendatangkan mashlahah dan menjauhkan mudharat bagi kehidupan manusia (Aziz & Solikah, 2013). Adapun kriteria maslahat itu sendiri adalah tegaknya kehidupan dunia demi tercapainya kehidupan akhirat. Imam Al-Syatibi kemudian membagi maqashid ini menjadi tiga bagian penting yaitu *dharuriyyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* (Milhan, 2021).

Imam Syatibi menjelaskan bahwa syariat Allah diturunkan untuk menjaga kemaslahatan dunia dan akhirat manusia. Maqashid, atau tujuan utama syariat, dibagi menjadi tiga bagian: *dharuriyyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyyah*. *Dharuriyyah* adalah kemaslahatan yang esensial dan wajib bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Jika *dharuriyyah* tidak terpenuhi, dapat menimbulkan kerusakan besar. *Maqashid dharuriyyah* mencakup menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. *Maqashid hajiyyah* adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar manusia hidup sejahtera dan terhindar dari kesengsaraan. Sedangkan *maqashid tahsiniyyah* adalah hal-hal yang menyempurnakan kesejahteraan manusia. Dalam konsep ini, *maqashid dharuriyyah*

menjadi dasar dari kedua *maqashid* lainnya, dengan *maqashid hajiyah* berperan sebagai pelengkap *maqashid dharuriyah*, dan *maqashid tahsiniah* sebagai pelengkap *maqashid hajiyah* (Syatibi, 2003).

Al-Dharuriyat Al-khams adalah konsep penting dalam pemikiran Islam yang mengacu pada lima kebutuhan dasar yang diperlukan untuk menjaga dan memelihara kehidupan manusia. Konsep ini mencakup lima hal utama yang dianggap sebagai kebutuhan esensial yang harus dipenuhi oleh individu dan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan dan keberhasilan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kelima kebutuhan dasar ini adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Perlindungan terhadap agama mencakup hak setiap individu untuk menjalankan keyakinan dan praktek agamanya tanpa tekanan atau gangguan dari pihak lain. Perlindungan terhadap jiwa mencakup upaya untuk mencegah kerugian fisik dan spiritual, serta menghindari segala bentuk kekerasan atau ancaman terhadap kehidupan manusia. Perlindungan terhadap akal berkaitan dengan kebebasan berpikir, belajar, dan berkembang secara intelektual tanpa batasan atau penindasan. Perlindungan terhadap keturunan meliputi hak setiap individu untuk membentuk keluarga dan melindungi keberlangsungan generasi berikutnya. Terakhir, perlindungan terhadap harta mencakup hak atas kepemilikan, penggunaan, dan pemeliharaan harta benda secara adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam Islam. Dengan memenuhi *Al-Dharuriyat Al-khams*, diharapkan masyarakat dapat mencapai kehidupan yang seimbang dan harmonis, baik dalam aspek spiritual maupun material (Busyro, 2019).

Sinergi antara Ma'had Al-Zaytun dan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia merupakan contoh nyata dari prinsip kerjasama dan gotong royong yang diajarkan dalam Islam. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaan-Nya (QS. Al-Ma'idah: 2).

Dalam Tafsir Al-Maraghi, ayat ini dijelaskan sebagai perintah kepada umat Islam untuk saling membantu dalam hal-hal yang membawa kebaikan dan ketakwaan. Al-Maraghi menekankan bahwa kebajikan mencakup segala bentuk amal shaleh yang mendekatkan diri kepada Allah, seperti sedekah, pendidikan, dan kegiatan sosial lainnya. Ketakwaan berarti menjaga diri dari segala bentuk kemaksiatan dan menjauhi larangan Allah. Al-Maraghi juga mengingatkan bahwa setiap bentuk kerjasama yang mengarah pada dosa dan pelanggaran harus dihindari. Ayat ini memotivasi umat untuk selalu berada dalam lingkup yang positif dan produktif serta menegakkan nilai-nilai kebaikan dan ketakwaan dalam setiap aspek kehidupan (Al-Maraghi, 1993).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam mewujudkan poros maritim dunia sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 dan perspektif *Fiqh Siyasah* dalam klasifikasi *Hifz Maal* (perlindungan harta) dan *Hifz Nafs* (perlindungan jiwa). Pembahasan tentang *Hifz Maal* (perlindungan harta) hal tersebut sesuai dengan firman Allah SWT dalam Q.S. At-Tahrim: 6 ayat ini menekankan pentingnya menjaga diri dan keluarga dari perbuatan yang bisa menjerumuskan ke dalam kebinasaan. Dalam konteks Ma'had Al-Zaytun, ini bisa diartikan sebagai tanggung jawab lembaga untuk mendidik santri agar memiliki pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam bidang maritim, sekaligus menanamkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Dengan demikian, para santri diharapkan tidak hanya menjadi profesional di sektor maritim tetapi juga mampu menjaga diri dan orang lain dari perbuatan yang merugikan.

Pembahasan tentang *Hifz Nafs* dibahas dalam firman Allah SWT Q.S. An-Nisa:9 ayat ini berbicara tentang tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang, memastikan mereka tidak ditinggalkan dalam keadaan lemah. Ma'had Al-Zaytun berperan dalam mencetak generasi yang kuat dalam pengetahuan dan keterampilan maritim, serta memiliki kesadaran untuk menjaga dan melestarikan kekayaan laut. Ini sejalan dengan klasifikasi *Hifz Maal* dan *Hifz Nafs* dalam *Fiqh Siyasah*, di mana pendidikan yang diberikan harus mampu mengelola sumber

daya maritim dengan bijaksana dan berkelanjutan, serta memastikan keselamatan dan kesejahteraan para pekerja maritim.

Dengan mengintegrasikan nilai-nilai dari Surat At-Tahrim: 6 dan An-Nisa: 9, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berfokus pada pencapaian ekonomi dan teknologi maritim tetapi juga membangun karakter santri yang bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak mulia. Ini menjadikan mereka sebagai agen perubahan yang mampu berkontribusi dalam pembangunan poros maritim dunia yang berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Peraturan Presiden tersebut, fokus utama adalah pengembangan sektor maritim sebagai pilar strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan kedaulatan bangsa. Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam, berperan dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan laut sebagai amanah dari Allah.

Dalam konteks *Fiqh Siyarah*, peran Ma'had Al-Zaytun dalam klasifikasi *Hifz Maal* mencakup pengelolaan sumber daya maritim yang bijaksana dan berkelanjutan. Hal ini berarti mendidik santri untuk memahami dan mengaplikasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang mendorong penggunaan harta dengan efisien dan adil. Sementara itu, dalam klasifikasi *Hifz Nafs*, Ma'had Al-Zaytun menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan kesejahteraan para pekerja maritim. Ini termasuk memastikan kondisi kerja yang aman dan juga sehat, serta memberikan pendidikan dan pelatihan yang memadai untuk menghindari kecelakaan dan risiko di laut. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun tidak hanya berkontribusi dalam pencapaian poros maritim dunia dari perspektif ekonomi dan teknologi, tetapi juga dari sudut pandang moral dan etika Islam. Pengajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai *Hifz Maal* dan *Hifz Nafs* ini bertujuan untuk menciptakan generasi maritim yang bertanggung jawab, profesional, dan berakhlak mulia sesuai dengan ajaran Islam (Busyro, 2019).

Fiqh Siyarah, sebagai disiplin ilmu yang membahas tata kelola dan kebijakan publik dalam Islam, memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia. Prinsip-prinsip *Fiqh Siyarah* dapat memberikan landasan etis dan moral yang

kuat dalam pelaksanaan kebijakan publik, termasuk kebijakan maritim. Di Ma'had Al-Zaytun, prinsip-prinsip ini diimplementasikan untuk memastikan bahwa kebijakan yang dijalankan tidak hanya efektif, tetapi juga adil dan berkelanjutan (Miftahuddin, 2024).

Salah satu prinsip utama dalam *Fiqh Siyarah* adalah keadilan (*'adl*). Prinsip ini mengharuskan setiap kebijakan publik untuk memperhatikan kesejahteraan semua pihak yang terlibat, termasuk nelayan, masyarakat pesisir, dan pelaku industri maritim. Dalam konteks kebijakan poros maritim, Ma'had Al-Zaytun menerapkan prinsip keadilan ini melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir. Program-program tersebut mencakup pelatihan keterampilan maritim, bantuan teknologi perikanan, dan upaya konservasi lingkungan yang berkelanjutan (Medina, 2024). Prinsip lain yang relevan adalah *musyawarah (syura)*, yang mengedepankan konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Ma'had Al-Zaytun mengimplementasikan prinsip ini dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam perumusan dan juga pelaksanaan program-program maritim mereka. Melalui forum diskusi dan lokakarya, masyarakat pesisir dan nelayan diberikan kesempatan untuk menyampaikan aspirasi dan kebutuhan mereka, sehingga kebijakan yang diambil lebih sesuai dengan kondisi lapangan dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak.

Prinsip tanggung jawab (*amanah*) juga menjadi landasan penting dalam *Fiqh Siyarah*. Ma'had Al-Zaytun memastikan bahwa setiap kebijakan maritim yang mereka jalankan didasarkan pada tanggung jawab moral dan etis untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut. Program-program konservasi yang diinisiasi oleh Ma'had Al-Zaytun, seperti penanaman mangrove dan pelestarian terumbu karang, merupakan bukti nyata dari komitmen mereka terhadap prinsip amanah ini. Upaya ini tidak hanya bertujuan untuk melestarikan ekosistem laut, tetapi juga untuk menjamin keberlangsungan sumber daya bagi generasi mendatang (Sagala, 2023). Namun, implementasi prinsip-prinsip *Fiqh Siyarah* dalam kebijakan maritim tidak selalu berjalan mulus. Tantangan seperti keterbatasan sumber daya, resistensi dari sebagian masyarakat, dan kurangnya dukungan dari

pemerintah sering kali menghambat pelaksanaan program-program yang telah direncanakan. Meski demikian, Ma'had Al-Zaytun terus berupaya mengatasi hambatan-hambatan ini melalui kolaborasi dengan berbagai pihak, baik di tingkat lokal maupun nasional, serta melalui peningkatan kapasitas internal mereka (Herbanu & Soediantono, 2022).

Menurut pendapat saya sebagai penulis, kontribusi *Fiqh Siyarah* dalam mendukung kebijakan Poros Maritim Dunia sangatlah signifikan. Prinsip-prinsip keadilan, *musyawarah*, dan tanggung jawab yang diusung oleh *Fiqh Siyarah* memberikan kerangka kerja yang etis dan berkelanjutan bagi pelaksanaan kebijakan maritim. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, Ma'had Al-Zaytun mampu menjalankan program-program maritim yang tidak hanya fokus pada aspek ekonomi, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat pesisir dan kelestarian lingkungan. Prinsip keadilan memastikan bahwa kebijakan yang diambil memperhatikan hak dan kepentingan semua pihak, prinsip *musyawarah* mendorong partisipasi aktif dari masyarakat, dan prinsip tanggung jawab menekankan pentingnya menjaga amanah dalam pengelolaan sumber daya laut. Selain itu, penerapan prinsip-prinsip *Fiqh Siyarah* oleh Ma'had Al-Zaytun juga memberikan contoh nyata bagaimana nilai-nilai Islam dapat diintegrasikan dalam kebijakan publik untuk mencapai kesejahteraan bersama. Dengan menerapkan prinsip *musyawarah*, Ma'had Al-Zaytun melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam proses pengambilan keputusan, memastikan bahwa kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Prinsip tanggung jawab yang dipegang teguh oleh Ma'had Al-Zaytun tercermin dalam berbagai upaya konservasi lingkungan yang dilakukan, seperti penanaman mangrove dan pelestarian terumbu karang, yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan sumber daya laut bagi generasi mendatang.

Ma'had Al-Zaytun telah memainkan peran yang signifikan dalam memberdayakan masyarakat pesisir untuk lebih berperan aktif dalam pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan. Institusi ini menyadari bahwa masyarakat pesisir merupakan tulang punggung dari sektor maritim Indonesia dan bahwa pemberdayaan mereka adalah kunci

untuk mencapai visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Melalui berbagai program pendidikan, pelatihan, dan pengabdian masyarakat, Ma'had Al-Zaytun berupaya meningkatkan kapasitas dan keterampilan masyarakat pesisir sehingga mereka dapat berkontribusi lebih efektif dalam pengembangan ekonomi kelautan (Susanto S., 2016).

Salah satu strategi utama yang diterapkan oleh Ma'had Al-Zaytun adalah melalui pendidikan dan pelatihan berbasis komunitas. Institusi ini mengadakan kursus-kursus singkat dan lokakarya yang fokus pada keterampilan praktis seperti teknik budidaya ikan, pengolahan hasil laut, dan manajemen sumber daya laut. Dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan yang relevan, Ma'had Al-Zaytun membantu masyarakat pesisir untuk meningkatkan produktivitas mereka dan menciptakan nilai tambah bagi hasil laut yang mereka peroleh. Pendidikan ini juga mencakup aspek-aspek lingkungan, seperti praktik penangkapan ikan yang berkelanjutan dan konservasi ekosistem laut, untuk memastikan bahwa sumber daya laut dapat terus dimanfaatkan dalam jangka panjang (Cahyadi, 2021).

Selain pendidikan dan pelatihan, Ma'had Al-Zaytun juga mendorong inovasi teknologi di kalangan masyarakat pesisir. Melalui kerjasama dengan lembaga penelitian dan industri, institusi ini memperkenalkan teknologi-teknologi baru yang dapat membantu meningkatkan efisiensi dan hasil tangkapan. Misalnya, alat penangkap ikan yang lebih efisien dan ramah lingkungan telah diperkenalkan kepada nelayan setempat. Teknologi ini tidak hanya membantu nelayan meningkatkan pendapatan mereka, tetapi juga membantu mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan laut. Inovasi semacam ini sangat penting untuk menciptakan keseimbangan antara peningkatan ekonomi dan pelestarian lingkungan (Sadariaanto, Anwar, & Purwanto, 2018).

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, Ma'had Al-Zaytun juga mengembangkan program-program pemberdayaan ekonomi. Salah satu program unggulan adalah pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor perikanan dan kelautan. Melalui dukungan finansial, pelatihan manajemen bisnis, dan akses ke pasar, Ma'had Al-Zaytun membantu

masyarakat pesisir untuk mengembangkan usaha mereka dan meningkatkan pendapatan keluarga. Program ini juga mencakup pembentukan koperasi nelayan yang dapat memperkuat posisi tawar masyarakat pesisir dalam rantai pasok perikanan, sehingga mereka dapat memperoleh harga yang lebih adil untuk hasil tangkapan mereka (Towadi, 2021).

Menurut pendapat saya sebagai penulis, peran Ma'had Al-Zaytun dalam pemberdayaan masyarakat pesisir sangatlah luas dan mencakup berbagai aspek, tidak hanya ekonomi, tetapi juga sosial dan budaya. Institusi ini menyadari bahwa kesejahteraan masyarakat pesisir tidak dapat dicapai hanya dengan peningkatan ekonomi semata, melainkan harus didukung oleh penguatan ikatan sosial dan budaya. Dengan menyelenggarakan berbagai kegiatan sosial seperti gotong royong, festival budaya, dan kegiatan keagamaan, Ma'had Al-Zaytun berusaha membangun komunitas yang kuat dan kohesif. Kegiatan-kegiatan ini tidak hanya mempererat hubungan antarwarga tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan solidaritas yang sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan komunitas.

Dalam aspek sosial, Ma'had Al-Zaytun telah berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung bagi masyarakat pesisir untuk tumbuh dan berkembang. Kegiatan gotong royong, misalnya, tidak hanya membantu menyelesaikan berbagai masalah infrastruktur di daerah pesisir tetapi juga memperkuat kerja sama dan saling pengertian antarwarga. Festival budaya yang diselenggarakan secara rutin juga berperan penting dalam melestarikan tradisi dan budaya lokal, sekaligus meningkatkan kebanggaan dan identitas komunitas. Selain itu, kegiatan keagamaan yang terintegrasi dalam program-program sosial juga membantu memperkuat nilai-nilai moral dan spiritual, yang menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang harmonis dan berkelanjutan. Melalui berbagai strategi dan program yang komprehensif, Ma'had Al-Zaytun telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberdayakan masyarakat pesisir. Institusi ini tidak hanya fokus pada peningkatan ekonomi melalui pendidikan dan pelatihan, tetapi juga memberikan perhatian besar pada penguatan sosial dan budaya. Pendekatan holistik yang diterapkan oleh Ma'had Al-Zaytun ini sangat

efektif dalam menciptakan perubahan yang berkelanjutan dan inklusif, serta memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan ekonomi kelautan dan perikanan Indonesia. Dengan komitmen dan upaya yang terus menerus, saya yakin Ma'had Al-Zaytun dapat terus menjadi agen perubahan yang penting dalam memberdayakan masyarakat pesisir dan mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan poros maritim dunia berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 adalah Ma'had Al-Zaytun memiliki peran yang signifikan dalam mendukung visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. Institusi ini secara aktif mengintegrasikan kurikulum maritim, mengembangkan keterampilan siswa dalam teknologi maritim, serta berkolaborasi dengan pemerintah untuk implementasi program-program yang berkelanjutan dalam sektor maritim. Dengan demikian, Ma'had Al-Zaytun berkontribusi dalam membangun sumber daya manusia yang kompeten dan peduli terhadap keberlanjutan laut.

Peran Ma'had Al-Zaytun dalam mewujudkan poros maritim dunia berdasarkan *Fiqh Siyarah* adalah sesuai dengan *Fiqh Siyarah* terkait *Hifz Nafs dan Hifz Maal*. Ma'had Al-Zaytun memiliki peran penting dalam mewujudkan poros maritim dunia sesuai dengan perspektif *Fiqh Siyarah* dalam klasifikasi *Hifz Maal* (perlindungan harta) dan *Hifz Nafs* (perlindungan jiwa). Ma'had Al-Zaytun, sebagai lembaga pendidikan Islam, berperan dalam mencetak generasi yang tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi maritim, tetapi juga memiliki kesadaran akan pentingnya menjaga dan melestarikan kekayaan laut sebagai amanah dari Allah.

B. Saran

Ma'had Al-Zaytun dapat meningkatkan integrasi kurikulum dengan lebih mendalam terkait kebijakan Poros Maritim Dunia yang diatur dalam Peraturan Presiden No. 34 Tahun 2022. Hal ini meliputi peningkatan materi yang berkaitan dengan keberlanjutan laut, manajemen sumber daya, dan teknologi maritim untuk mendukung generasi yang terampil dan peduli terhadap lingkungan.

Ma'had Al-Zaytun dapat memperkuat program-program yang mengajarkan pentingnya menjaga ekosistem laut, termasuk pelestarian terumbu karang dan konservasi mangrove.

Penelitian yang lebih lanjut dengan fokus pada aplikasi hukum Islam dalam konteks lingkungan maritim. Ma'had Al-Zaytun dapat memfasilitasi penelitian yang mengulas lebih mendalam implikasi hukum dan etika Islam terhadap kebijakan maritim global, sehingga memberi kontribusi signifikan terhadap visi Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

DAFTAR RUJUKAN

- Adam, L., & Dwiastuti, I. (2015). Membangun Poros Maritim Melalui Pelabuhan. Masyarakat, 41(2). *Masyarakat Indonesia*, Vol. 41 (2), Desember <https://www.proquest.com/results/F0937813e8284900pq/1?Accountid=215586>, 163–176.
- Agusta, A. (2017). Analisis Undang-Undang Kelautan Di Wilayah Zona Ekonomi Eksklusif. *Gea. Jurnal Pendidikan Geografi*, 17(2) <https://www.proquest.com/results/F0937813e8284900pq/1?Accountid=215586>, 147–152.
- Al Haq, I. A., & Rohmah, S. N. (2021). Korelasi Konsep Kementerian (Wizarah) Menurut Imam Al-Mawardi Dan Implementasinya Di Kementerian Indonesia*. *Mizan: Journal Of Islamic Law*, Vol. 5 No. 2(P-Issn: 2598-974x. E-Issn: 2598-6252), 261-272.
- Al Umar, A. U., Savitri, A. S., Pradani, Y. S., Mutohar, Khamid, N., & Al, E. (2021). “Peranan Kuliah Kerja Nyata Sebagai Wujud Pengabdian Kepada Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Iain Salatiga Kkn 2021)”. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 42 Volume. 1., No. 1.,
- Ardiyanti, D. (2018). Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia: Tantangan Dan Peluang Keamanan Dan Ekonomi Era Jokowi. *Resolusi Vol. 1 No. 2 Desember*, <https://www.proquest.com/results/F0937813e8284900pq/1?Accountid=215586>.
- Auliadin, A., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pendidikan Di Kabupaten Indramayu. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 10 No. 5 (P-Issn: 2356-1459. E-Issn: 2654-9050), 1641-1648.
- Aziz, M., & Solikah. (2013). Metode Penetapan Maqoshid Al Syari'ah: Studi Pemikiran Abu Ishaq Al Syatibi. *Ulul Albab; Malang*, Vol. 14, Iss. 2, Hlm.7.
- Brotosusilo, A., Apriana, I. A., Satria, A. A., & Jokopitoyo, T. (2016). Littoral And Coastal Management In Supporting Maritime Security For Realizing Indonesia As World Maritime Axis. *Iop Conf. Series: Earth And Environmental Science* 30 (2016) 012016 [Doi:10.1088/1755-1315/30/1/012016, https://www.proquest.com/results/F0937813e8284900pq/1?Accountid=215586](https://www.proquest.com/results/F0937813e8284900pq/1?Accountid=215586).
- Busyro. (2019). *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah* . Jakarta Timur: Prenada Media Group.
- Cahyadi, F. D. (2021). Literasi Kelautan Dalam Perkuliahan Pendidikan Kelautan Dan Perikanan Untuk Menunjang Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Jurnal Pendidikan Perikanan Kelautan*,
- Devidyanto. (2019). “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Ima Di Pasar Segiri Kota Samarinda” . *Jurnal Sosiologi*, Volume. 7., No. 4., H. 16. .
- Edrian, M. (2017). Melihat Keamanan Maritim Indonesia Dari Ide Poros Maritim. *Vol 2 No 2: Defendonesia Juni 2017* <https://www.proquest.com/results/F0937813e8284900pq/1?Accountid=215586>, 17–24.
- Fathiraini, N., Darmawan, W., Ma'mur, T., & Fauzi, W. (2020). The Vantage Point Of Geopolitics: Capturing Indonesia's Maritime Axis. *Iop Conf. Series: Earth And Environmental Science* 1089 (2022) 012062, <https://www.proquest.com/docview/2734314877/2ad4fbb0320a40f5pq/1?Accountid=33171&Sourcetype=Scholarly%20journals>.
- Finaka, A. W. (2020). Strategi Indonesia Menuju Poros Maritim Dunia. *Indonesia Baik.Id*.

- Ghufron, M. M., Herdiansyah, A. G., & Aeni, N. (2018). Air Power Development Strategy To Maintain Indonesian National Security As The World Maritime Axis. *Central European Journal Of International And Security Studies* 12, No. 4 <https://www.proquest.com/results/f0937813e8284900pq/1?accountid=215586>, 144–164.
- Habibi, M. I. (2023). Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Tuak Berdasarkan Perda Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Larangan Peredaran Minuman Beralkohol Di Kecamatan Rao Menurut Perspektif *Fiqh Siyasah*. *Journal Of Sharia And Law*.
- Herbanu, R. P., & Soediantono, D. (2022). Industri Pertahanan Indonesia Dalam Membangun Kekuatan Maritim Nasional. *Journal Of Industrial Engineering & Management Research*, 3(4), 26-31.
- Jamilah, I. N., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Kebijakan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Perspektif Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 Dan *Fiqh Siyasah* (Studi Kasus Di Kecamatan Gantar Kabupaten Indramayu). *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 10 No.4.
- Kartubi. (2024). Mengembalikan Natuna Sebagai Pusat Poros Maritim Dunia Tinjauan Ekonomi Dan Perdagangan Serantau. *Jurnal Segeram Vol. 3no 1*.
- Maroli. (2017, Mei 4). *Bumikan Visi Indonesia Poros Maritim Dunia, Kemenko Kemaritiman Gelar Rakornas*. Diambil Kembali Dari [Kominfo.Go.Id: https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/9614/Bumikan-Visi-Indonesia-Poros-Maritim-Dunia-Kemenko-Kemaritiman-Gelar-Rakornas/0/Artikel_Gpr](https://www.kominfo.go.id/index.php/content/detail/9614/Bumikan-Visi-Indonesia-Poros-Maritim-Dunia-Kemenko-Kemaritiman-Gelar-Rakornas/0/Artikel_Gpr)
- Maulida, N. A., Rohmah, S. N., & Sajali, M. (2023). Implementasi Program Kerja Bappeda Provinsi Jawa Barat Perspektif Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Dan *Fiqh Siyasah*. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 10 No. 2(P-Issn: 2356-1459. E-Issn: 2654-9050), 577-594.
- Medina, D. M. (2024). The Efforts Of The Indonesian Government To Realize Indonesia As The World's Maritime Axis. *Jurnal Hukum Das Sollen*.
- Meliála, A. &. (2023). Siapkah Indonesia Menjadi Poros Maritim Dunia? In *Prosiding Kontribusi Forum Akademisi Sac*.
- Miftahuddin, M. (2024). Natuna Dalam Konsepsi Poros Maritim Dunia. *Jurnal Segeram*.
- Milhan. (2021). Maqashid Syari'Ah Menurut Imam Syatibi Dan Dasar Teori Pembentukannya. *Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsyah P-Issn : 2338-1264*, Vol. 06, No. 01, Nopember 2021.
- Mustari, B., Supartono, & Barnas, R. (2018). Strategi Pertahanan Laut Nusantara Dalam Mewujudkan Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia. *Jurnal Prodi Strategi Perang Semesta Vol. 4 No. 2*.
- Nainggolan, P. P. (2015). Kebijakan Poros Maritim Dunia Joko Widodo Dan Implikasi Internasionalnya (Maritime Axis Policy And Its International Implications). *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data Dan Informasi (P3di) Sekretariat Jenderal Dpr Ri*.
- Nasheed, A. R., & Kamal, M. M. (2023). Dispute Settlement Mechanisms Under The United Nations Convention On The Law Of The Sea 1982: The Way Forward For Maldives. [Mekanisme Penyelesaian Pertikaian Di Bawah Losc1982: Haluan Ke Hadapan Untuk Maldives]. *Iium Law Journal Vol. 31 (2)* Retrieved From <https://www.proquest.com/scholarly-journals/dispute-settlement-mechanisms-under-united/docview/2913714971/se-2>, 253 - 286.
- Nasional, D. P. (2007). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Nasional, D. P. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- Noor, J. (2011). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Nukeriana, D. (2018). "Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Pangan Di Kota

- Bengkulu". *Jurnal Hukum Islam*, Volume. 3., No. 1, H. 163.
- Patriana, R., Adiwibowo, S., Kinseng, R., & Satria, A. (2016). Perubahan Kelembagaan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Laut Tradisional (Kasus Kelembagaan Sasi Di Kaimana) The Dynamics Of Sasi In Kaimana: The Institutional Change Over Traditional Marine Resource Management. *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan / Desember*, 257-264.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 51*.
- Poerwadarminto, W. (1984). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pn Balai Pustaka.
- Prawoto, I., & Anisa, F. (2023). Peran Pondok Pesantren Al-Zaytun Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Sekitar. *Eksisbank (Ekonomi Syariah Dan Bisnis Perbankan)*, Volume 7, Nomor 1, Juni , 123-135.
- Prawoto, I., Rohmah, S. N., & Sunarya, F. R. (2020). Peran Preventif Pemimpin Dalam Pencegahan Penyebaran Covid-19; Strategi Syaykh Al-Zaytun Di Ma'had Al-Zaytun Dan Kontribusinya Terhadap Masyarakat Sekitar. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5) Doi:10.15408/Sjsbs. V7i5.15571, 403-422.
- Pudjiastuti, E., Putra, I., & Susilo, A. (2021). Vision Of The World Maritime Axis Of Indonesia As A Maritime Country In Alfred Thayer Mahan's Perspective. *Journal Of Defense Resources Management Vol. 12, Issue 2 (23)*, <https://www.proquest.com/docview/2621170589/1e8537fbc39b4d4b4bpq/2?accountid=33171&sourcetype=Scholarly%20journals>.
- Pungki Harmoko, S. N. (2020). Pandangan Syaykh Al-Zaytun A.S. Panji Gumilang Terhadap Pancasila Perspektif *Fiqh Siyarah*. *Salam; Jurnal Sosial Dan Budaya*.
- Puspitawati, D. (2021). Pembangunan Wilayah Kepulauan Berlandaskan Poros Maritim Dalam Perspektif Negara Kepulauan: Tantangan Dan Peluang Perimbangan Keuangan Daerah. *Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Putra, A. B. (2022, Juni 8). *Mewujudkan Indonesia Menjadi Poros Maritim Di Dunia*. Diambil Kembali Dari Umg Universitas Muhammadiyah Gresik: <https://umg.ac.id/opini/mewujudkan-indonesia-menjadi-poros-maritim-di-dunia>
- Qowiyyu, L. N. (2019). *Diplomasi Poros Maritim Dunia :Perspektif Politik Internasional Dan Fiqh Siyarah Dauliyah*. Jakarta: Pustakapedia Indonesia,.
- Qurgianto, A. P. (2023). Hubungan Diplomasi Maritim Dan Navigasi Lautan Antara Indonesia Dan Rrt Pada Masa Jabatan Menteri Susi Pudjiastuti. *Jurnal Ilmu Sosial*.
- Rachmawati, I. N. (2007, Maret). Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara. *Jurnal Keperawatan Indonesia*, 11(1), 35-40.
- Rahim, A., Jabar, M. A., Zahira, T., Nazhif, N., & Widodo, S. (2024). Urgensi Pendidikan Karakter Bagi Pelajar Ma'had Al-Zaytun. *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)* , Volume 7, Nomor 3, Maret(Eissn: 2614-8854), 2878-2883.
- Rahim, A., Rifai, A., Soleha, A., Fauziah, H. J., & Syain, M. (2023). Peran Pemerintah Daerah Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 3 Tahun 2016. *Jiip (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)*, Volume 6, Nomor 4, April(Eissn: 2614-8854), 2160-2163.
- Rozani, N. G., Rohmah, S. N., & Rahim, A. (2023). Perlindungan Terhadap Korban Seks Komersial Anak Di Bawah Umur Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Dan Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, Vol. 10 No. 4 (P-Issn: 2356-1459. E-Issn: 2654-9050), 1127-1142.
- Sadaraianto, Anwar, S., & Purwanto. (2018). Pengaruh Pemberdayaan Wilayah Maritim Dan Pelatihan Nelayan Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pesisir Dalam Rangka Mengoptimalkan Strategi Pertahanan Di Desa Gisik Cemandi

- Kabupaten Sidoarjo. *Strategi Perang Semesta*.
- Sagala, A. I. (2023). Edukasi Pengetahuan Maritim Pada Tingkat Pendidikan Sekolah Menengah Atas Di Kota Medan. *Jurnal Pengabdian Penmarim*.
- Siswoputro, S. P. (2023). The World's Maritime Axis, A Critical Analysis. *Formosa Journal Of Science And Technology*.
- Soekanto, S. (2013). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Pt.Raja Grafindo Persada.
- Soewadji, J. (2012). *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Soleha, A., & Rohmah, S. N. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Dugaan Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Dan Hukum Islam. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 1867-1878.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D - Mppk*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendrawan, D., Apriyanto, I. P., Prakoso, L. Y., Taufik, R. M., Ansori, Parwata, I., . . . Purwantoro, S. A. (2023). Kebijakan Poros Maritim Dunia Dihadapkan Dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2014 Dalam Rangka Mewujudkan Ketahanan Nasional. *Journal Of Innovation Research And Knowledge Vol.2, No.8, Januari*.
- Sumadinata, W. S. (2022). Membangun Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia: Telaah Kritis Fungsi Keamanan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut. *Ijd: International Jurnal Demos*.
- Suryawan, A., Susilo, E., & Jumino. (2021). Optimalisasi Kerjasama Tni Al Dengan Perhubungan Laut Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Poros Maritim Dunia. *Jurnal Abdimas Bina Bangsa Vol. 02, No. 01, Juli*.
- Susanto, S. (2016). Percepatan Pembangunan Infrastruktur Transportasi Laut. *Jurnal Lemhannas Ri*.
- Towadi, M. P. (2021). Desa Mandiri Maritim: Wujud Ketahanan Maritim Melalui Penguatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Di Desa Ponipingan, Sulawesi Tengah. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*.
- Zulham, H. M. (2019). Strategi Indonesia Dalam Mewujudkan Poros Maritim Dunia Di Tengah Kebijakan Jalur Sutra Maritim China. *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora*.